



Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember

Samsul Hadi^{1*}, Ahmad Taufiki², Maulana Zakaria Ahmad², Adil Siswanto⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹syammeela13@gmail.com, ²fikiahmad241001@gmail.com, ³fikiahmad241001@gmail.com, ⁴adilsiswanto@uinkhas.ac.id

Article History:

Received Jan 05th, 2024

Revised Jan 10th, 2024

Accepted Jan 15th, 2024

Abstrak

Kemiskinan di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember, tetap menjadi tantangan besar yang kompleks dan multidimensional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember meningkat sebesar 0,12 persen poin dalam satu tahun, dari 9,39 persen pada Maret 2022 menjadi 9,51 persen pada Maret 2023. Dalam menanggulangi kemiskinan, data yang akurat sangatlah penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran BPS dalam menyediakan data yang tepat dan relevan tentang kemiskinan di tingkat lokal, menggunakan analisis data kualitatif dengan data sekunder dari publikasi BPS tahun 2023, seperti garis kemiskinan, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Analisis menunjukkan kenaikan garis kemiskinan dan penurunan persentase, indeks kedalaman, serta keparahan kemiskinan dari 2010 hingga 2023. Jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kemiskinan di Jember pada tahun 2023, diharapkan memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dan pemangku kebijakan setempat untuk meningkatkan efektivitas dalam pemantauan dan penanganan kemiskinan di daerah tersebut.

Kata Kunci : Kemiskinan, BPS

Abstract

Poverty in East Java, including in Jember Regency, remains a major challenge that is complex and multidimensional. The percentage of poor people in Jember Regency increased by 0.12 percentage points in one year, from 9.39 percent in March 2022 to 9.51 percent in March 2023. In overcoming poverty, accurate data is very important for designing and implementing effective policies. The main objective of this research is to evaluate the role of BPS in providing accurate and relevant data about poverty at the local level, using qualitative data analysis with secondary data from BPS publications in 2023, such as the poverty line, percentage of poor population, depth index and poverty severity index. The analysis shows an increase in the poverty line and a decrease in the percentage, depth index, and severity of poverty from 2010 to 2023. This journal aims to provide a deeper understanding of the dynamics of poverty in Jember in 2023, it is hoped that it will provide valuable insights for the government and local policy makers to increase effectiveness in monitoring and handling poverty in the area.

Keyword : Poverty, BPS

PENDAHULUAN

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan (Ferezagia, 2018). Dalam definisi konvensional kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika pendapatan suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan tertentu (Sukandar et al., 2008). Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan kedalam kelompok miskin ketika pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok berada dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh BPS (BPS JEMBER, 2024). Menurut Ravallion (1994), garis kemiskinan adalah jumlah uang yang diperlukan individu untuk mencapai level kesejahteraan minimum sehingga tidak dikategorikan sebagai miskin (Sugiyarto et al., 2016).





Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Kabupaten Jember, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, juga tidak luput dari permasalahan ini. Kemiskinan di Jember merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya sebatas kekurangan materi, tetapi juga termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi social (BPS JEMBER, 2023). Mengatasi kemiskinan di Jember membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi, serta data yang akurat dan terpercaya.

Dua strategi yang harus diambil dalam upaya mengatasi kemiskinan adalah, pertama, memberikan perlindungan kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka di berbagai sektor. Kedua, memberikan pelatihan kepada mereka agar memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya kemiskinan baru. Langkah-langkah ini diimplementasikan dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. (Royat, 2015).

Untuk menerapkan kebijakan yang tepat dan efektif dibutuhkan data terkait kemiskinan yang akurat dan terpercaya. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga statistik resmi di Indonesia memiliki peran vital dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terpercaya. Data BPS menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta bagi para peneliti dan akademisi dalam melakukan penelitian terkait kemiskinan. Meskipun data kemiskinan BPS banyak digunakan oleh berbagai pihak, terdapat kesenjangan pemahaman antara BPS dan pengguna data terkait metodologi pengolahan data. Kesenjangan ini dapat menimbulkan misinterpretasi, misinformasi, ketidakpercayaan terhadap data kemiskinan, dan pada akhirnya menghambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menjelaskan secara komprehensif proses pengolahan data kemiskinan di BPS. Penjelasan ini meliputi konsep dan definisi kemiskinan, metodologi pengukuran kemiskinan, analisis dan interpretasi data kemiskinan, serta pemanfaatan data kemiskinan untuk berbagai kepentingan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan bagi pemerintah, memperkaya penelitian dan analisis terkait kemiskinan bagi peneliti dan akademisi, serta meningkatkan pemahaman tentang kemiskinan dan mendorong partisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat umum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Data yang menjadi fokus analisis merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Data yang dianalisis meliputi berbagai parameter penting terkait kemiskinan, seperti garis kemiskinan, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara memeriksa, mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang terkandung dalam publikasi BPS. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi kemiskinan di Jember pada tahun 2023, serta untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang muncul dari data tersebut.

Metode deskriptif dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci tentang karakteristik kemiskinan di Jember. Dengan memanfaatkan data sekunder dari BPS, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam tentang situasi kemiskinan di tingkat lokal, sehingga memberikan sumbangan yang berharga bagi perumusan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

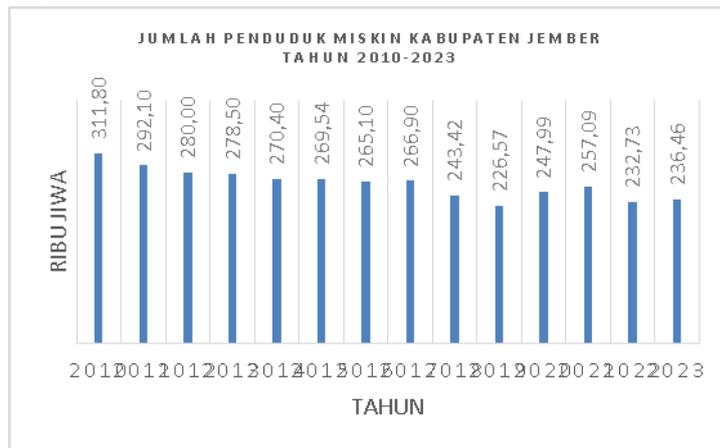
Penduduk miskin merupakan penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan berada di bawah garis kemiskinan tertentu. Garis kemiskinan tersebut ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan survei yang dilakukan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makanan dan bukan makanan. (BPS JEMBER, 2023).



Gambar 1. Proses pengolahan data kemiskinan

Gambar 1. Proses pengolahan data kemiskinan pada website BPS Kabupaten Jember di bantu oleh pegawai BPS

Kegiatan pada gambar 1 merupakan proses pengolahan data pada database BPS Kabupaten jember. Dalam mengukur kemiskinan, data yang digunakan sebagai rujukan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.. Susenas mengumpulkan data tentang keadaan sosial ekonomi secara umum, Panel Modul Konsumsi mengumpulkan data tentang konsumsi rumah tangga, dan Kor adalah kelompok referensi yang digunakan untuk menghitung Garis Kemiskinan (BPS JEMBER, 2024).



Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin kabupaten Jember

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten Jember dalam periode 14 tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2010-2023 jumlah penduduk miskin di kabupaten Jember cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 311,80 ribu jiwa, berkurang sebesar 75,34 ribu jiwa menjadi 236,46 ribu jiwa pada tahun 2023. Namun pada masa pandemi Covid-19 terjadi peningkatan sejak 2020-2021 dan pada tahun 2022 terjadi penurunan. Namun demikian pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan penduduk miskin. Selama periode Maret 2022-Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember bertambah sebanyak 3,73 ribu jiwa, dari 232,73 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 236,46 ribu jiwa pada Maret 2023.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makanan (GKM) dan bukan makanan (GKNM). GK dihitung dengan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (BPS JEMBER, 2024).

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKMN = Garis Kemiskinan Non Makanan



Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Terdapat 2 tahap dalam menentukan GKM.

Pertama, dalam menentukan garis kemiskinan adalah dengan memilih kelompok referensi. Kelompok ini terdiri dari 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS sendiri dihitung berdasarkan garis kemiskinan periode sebelumnya yang dinaikkan dengan inflasi umum (IHK). Kelompok referensi ini disebut juga sebagai penduduk kelas marginal. kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) berdasarkan penduduk kelas marginal tersebut.

Kedua, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan minimum. Kebutuhan minimum makanan ini setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penetapan 2.100 kilokalori ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. GKM dihitung berdasarkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang dikonsumsi oleh penduduk referensi. Nilai pengeluaran dari 52 komoditi ini kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan ini dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar untuk menghitung GKM adalah (BPS JEMBER, 2024)

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} * Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana:

GKM_j = GKM daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori)

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

J = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

kemudian GKM_j ini disetarakan dengan 2100 kilokalori. Caranya dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga

$$HK_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Dimana:

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

F_j = HK_j * 2100

Dimana:

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah jumlah nilai kebutuhan minimum dari berbagai komoditi non-makanan terpilih. Komoditi ini meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Jenis barang dan jasa non-makanan yang dihitung dalam GKNM terus berkembang dan disempurnakan setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebelum tahun 1993, GKNM dihitung berdasarkan 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998, GKNM dihitung berdasarkan 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan rasio pengeluaran. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pengeluaran untuk komoditi/sub-kelompok tersebut dengan total pengeluaran untuk semua komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKP) 2004. SPKKP 2004 dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Berikut adalah rumus matematis untuk menghitung nilai kebutuhan minimum non-makanan (BPS JEMBER, 2024).

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i * V_i$$

Dimana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM_p).

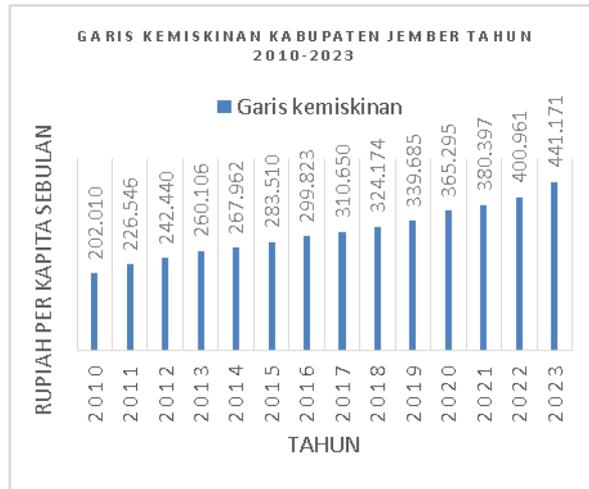
V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

I = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan)





Gambar 3. Garis Kemiskinan kabupaten jember

Gambar 3 menunjukkan garis kemiskinan di kabupaten jember dalam periode 14 tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2010-2023 garis kemiskinan di kabupaten Jember setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun periode 2010-2023 garis kemiskinan di kabupaten Jember mengalami kenaikan sebesar Rp 239.16,00 yang awalnya Rp. 202.010,00 per kapita per bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 441.171,00 per kapita per bulan pada tahun 2023.

Head Count Index (HCI-P0) adalah salah satu indikator kemiskinan yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka HCI-P0 dihitung dengan membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah total penduduk. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai HCI-P0 yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Sebaliknya, nilai HCI-P0 yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah rendah (BPS JEMBER, 2024).

$$P0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^0$$

Dimana:

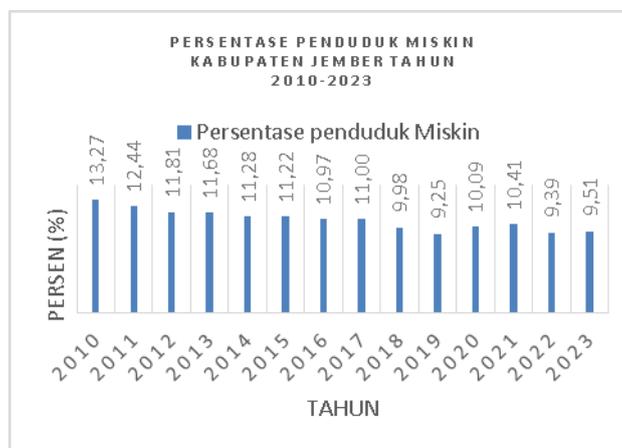
P0 = Presentase penduduk miskin (head count index)

Z = Garis kemiskinan

Y1 = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q); y1

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk



Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin kabupaten Jember

Gambar 4 menunjukkan persentase penduduk miskin di kabupaten jember dalam periode 14 tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2010-2023 persentase penduduk miskin di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,27 %, berkurang sebesar 3,76% menjadi 9,51 % pada tahun 2023. Namun pada masa COVID-19 tahun 2020-2021 terjadi kenaikan persentase penduduk

miskin yang awalnya 9,25 % pada tahun 2019 naik menjadi 10,09% pada tahun 2020 dan naik lagi menjadi 10,41 % pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 menurun menjadi 9,39 % dan pada 2023 meningkat menjadi 9,51%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan salah satu indikator kemiskinan yang digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin parah tingkat kemiskinan (BPS JEMBER, 2024).

$$P1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)$$

Dimana:

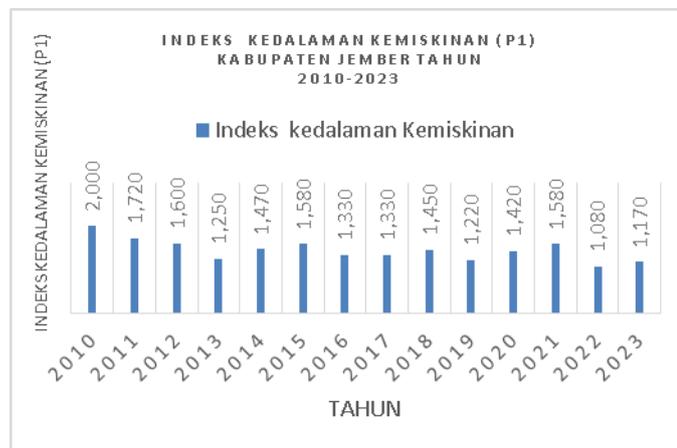
P1 = Indeks kedalam kemiskinan

Z = Garis kemiskinan

Y1 = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...q); y1

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk



Gambar 5. Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) kabupaten Jember

Gambar 5 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten jember dalam periode 14 tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2010-2023 indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 2,000 berkurang sebesar 0,830 poin menjadi 1,170 pada tahun 2023. Namun pada periode 2022-2023 terjadi kenaikan sebesar 0,090 poin yang awalnya 1,080 pada tahun 2022 menjadi 1,170 pada tahun 2023.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2, semakin besar kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin yang satu dengan yang lain. P2 memberikan informasi yang lebih lengkap tentang tingkat kemiskinan dibandingkan dengan P1. P1 hanya menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran dari garis kemiskinan, sedangkan P2 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS JEMBER, 2024).

$$P2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^2$$

Dimana:

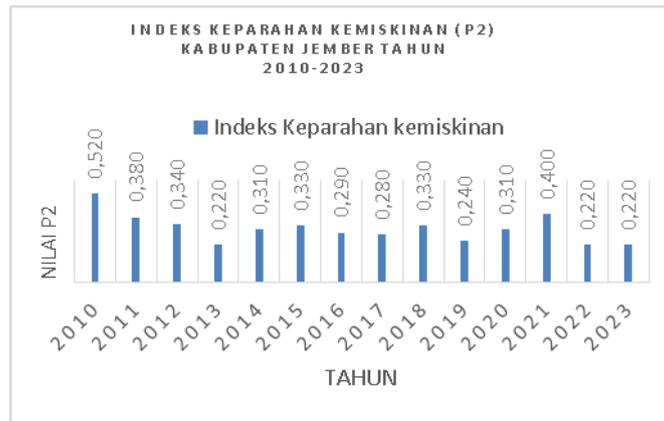
P2 = Indeks keparahan kemiskinan

Z = Garis kemiskinan

Y1 = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...q); y1

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk



Gambar 6. Indeks Keparahan kemiskinan kabupaten Jember

Gambar 6 menunjukkan indeks keparahan kemiskinan di kabupaten jember dalam periode 14 tahun terakhir. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2010-2023 indeks keparahan kemiskinan di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 0,520 berkurang sebesar 0,300 poin menjadi 0,220 pada tahun 2023. Namun pada masa COVID-19 tahun 2020-2021 terjadi kenaikan yang awalnya sebesar 0,240 pada tahun 2019, naik menjadi 0,310 pada tahun 2020 dan naik lagi menjadi 0,400 pada tahun 2021. Sedangkan pada periode 2022-2023 nilai P2 cenderung tidak mengalami perubahan karena nilainya tetap berada di angka 0,220.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah jember menerapkan beberapa kebijakan yang tertulis di dalam Peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember Bab V pasal 31.

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial
Melalui kegiatan ini, masyarakat miskin diberikan informasi dan pemahaman tentang berbagai aspek penting seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan keterampilan hidup. Pendampingan sosial juga dilakukan untuk membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b. Pelayanan sosial
Pelayanan sosial meliputi berbagai bentuk bantuan dan dukungan sosial, seperti bantuan pangan, bantuan tunai, program bantuan pendidikan, program kesehatan masyarakat, dan program bantuan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
- c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
Upaya ini termasuk dalam pemberdayaan ekonomi, di mana pemerintah dan lembaga terkait memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan yang layak atau mendukung mereka dalam memulai usaha kecil atau mikro.
- d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar
Masyarakat miskin diberikan akses kepada pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, imunisasi, dan program kesehatan lainnya yang membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka.
- e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar
Melalui program ini, masyarakat miskin diberikan akses kepada pendidikan dasar yang layak, seperti sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan, serta program bantuan untuk anak-anak yang membutuhkan.
- f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman
Masyarakat miskin diberikan akses kepada perumahan yang layak dan terjangkau, serta dukungan untuk meningkatkan kondisi permukiman mereka.
- g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha:
Melalui program ini, masyarakat miskin diberikan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan dukungan dalam pemasaran hasil usaha mereka untuk meningkatkan potensi ekonomi dan penghasilan mereka.

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai program-program untuk mengatasi kemiskinan, antara lain (BPS JEMBER, 2023):

1. Program Bantuan Sosial: Jember Berbagi (J-Berbagi): Program bantuan sosial yang memberikan bantuan sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat miskin.
2. Kartu Jember Sejahtera (KJS): Program bantuan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin.
3. Program Keluarga Harapan (PKH): Program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu.
- 4.



KESIMPULAN

Pada periode 2010-2023 penduduk miskin di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 311,80 ribu jiwa, berkurang sebesar 75,34 ribu jiwa menjadi 236,46 ribu jiwa pada tahun 2023.

Pada periode 2010-2023 garis kemiskinan di kabupaten Jember mengalami kenaikan sebesar Rp 239.16,00 yang awalnya Rp. 202.010,00 per kapita per bulan pada tahun 2010 menjadi Rp. 441.171,00 per kapita per bulan pada tahun 2023.

Pada periode 2010-2023 persentase penduduk miskin di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 13,27 %, berkurang sebesar 3,76% menjadi 9,51 % pada tahun 2023.

Pada periode 2010-2023 indeks kedalaman kemiskinan di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 2,000 berkurang sebesar 0,830 poin menjadi 1,170 pada tahun 2023.

Pada periode 2010-2023 indeks keparahan kemiskinan di kabupaten Jember cenderung mengalami penurunan. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 0,520 berkurang sebesar 0,300 poin menjadi 0,220 pada tahun 2023.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan kabupaten jember menerapkan beberapa kebijakan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember Bab V pasal 31. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial / pendampingan sosial
- b. Pelayanan sosial
- c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar
- e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar
- f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman
- g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan pengabdian di lembaganya. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan LPPM Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Serta kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Jember. 2023. *Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember*. Badan Pusat Statistik kabupaten Jember
- BPS JEMBER. (2024). *Konsep Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- BPS JEMBER. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Peraturan Daerah Kabupaten jember. (2015). Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Royat, Sujana. 2015. *Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangulan Kemiskinan. Jakarta
- Sugiyarto, S., Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2016). Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro. *Agro Ekonomi*, 26(2), 115. <https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264>
- Sukandar, D., Suhandia, N. S., Amalia, L., & Khairunisa, K. (2008). Analisis Diskriminan Untuk Menentukan Indikator Garis Kemiskinan. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 3(2), 94. <https://doi.org/10.25182/jgp.2008.3.2.94-100>
- Yacoub, Y. 2010. *Pengaruh Tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Eksos* vol.8 no.3